



## Transformasi Peran Kiai dalam Politik Indonesia dari Otoritas Keagamaan ke Ranah Politik Praktis

Haliza Rizqica Fadillah<sup>1\*</sup>, Juliansyah Aditya Rahadian<sup>2</sup>, Moch. Faisal Rais<sup>3</sup>,  
Milana Sapta Dewi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [Halizaarf21@gmail.com](mailto:Halizaarf21@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliansyahrahadian@gmail.com](mailto:juliansyahrahadian@gmail.com)<sup>2</sup>, [faisalrais19@gmail.com](mailto:faisalrais19@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[milanasaptadewi1004@gmail.com](mailto:milanasaptadewi1004@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [Halizaarf21@gmail.com](mailto:Halizaarf21@gmail.com)\*

**Abstrack :** *Kiai have a central role in society which makes the figure of kiai highly respected and respected in society. The expertise that a kiai has is what makes him a central figure in the public's attention and a kiai who has many people who trust him. On the other hand, politicians who need the masses to gain votes of support often approach kiai to ask for advice or even ask for support from kiai because they see kiai who have a large mass. The aim of this research is to see the transformation of the role of kiai, who were initially as religious actors and are now becoming practical political figures. In writing this article the author used a qualitative descriptive method with literature and document studies. It can be concluded from this research that the role of kiai, which previously was only as a religious figure, has now spread to become a practical political figure. This research seeks to explain the transformation of the role of kiai and also the impacts resulting from this transformation.*

**Keyword :** *Transformation, Kiai, politics.*

**Abstrak :** Kiai memiliki peran yang sentral ditengah-tengah Masyarakat yang membuat sosok kiai sangat dihormati dan disegani dilingkungan Masyarakat. Keahlian yang dimiliki sosok kiai yang menjadikannya sebagai tokoh yang sentral dingeha msyarakat dan sosok kiai yang memiliki banyak massa yang memercayainya. Di sisi lain politisi yang membutuhkan massa untuk memperoleh suara dukungan seringkali menghampiri kiai untuk meminta wejangan atau bahkan meminta dukungan kepada kiai karena melihat kiai yang memiliki massa yang banyak. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat transformasi peran kiai yang mulanya sebagai actor keagamaan dan kini Tengah merambat menjadi tokoh politik praktis. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan dokumen. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa peran kiai yang dulu hanya sebagai tokoh agama saja, kini sudah merambat menjadi tokoh politik praktis. Dalam penelitian ini berusaha menjelaskan transformasi peran kiai dan juga dampak yang dihasilkan dari trasformasi tersebut.

**Kata kunci :** Transformasi, Kiai, politik.

### 1. PENDAHULUAN

Kiai merupakan sebuah sebutan, dimana mana sebutan ini sudah sangat dikenal oleh seluruh Masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa. Julukan kiai ini biasa diberikan kepada seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan mengenai agama yang berbeda dengan Masyarakat lainnya atau bisa disebut seorang kiai ini adalah orang yang sangat mengerti mengenai ilmu agama. Dengan kepintarannya atau keahliannya itu kiai mendapatkan pengakuan dan juga penghormatan ditengah Masyarakat- Masyarakat. (Suryana, 2024)

Peran kiai ditengah Masyarakat dianggap sangat penting. Sebab kiai berperan bukan hanya sebagai orang yang pintar dengan agama, akan tetapi kiai juga berperan sebagai guru, imam, dan juga tokoh Masyarakat yang sangat berpengaruh di lingkungan

Masyarakat selain dari pemerintah. Tak hanya itu, dalam menentukan hari pernikahan saja ataupun masalah-masalah duniawi, masyarakat sering kali mendengarkan perkataan kiai ataupun saran yang diberikan kiai tentang penentuan hari dan penyelesaian masalahnya, maka tidak heran jika Masyarakat seringkali menjadikan kiai sebagai tokoh yang sangat penting dan perlu legitimasi darinya dalam menyelesaikan masalah yang berbau agama. Dengan kata lain, kiai merupakan tokoh elite yang ada di lingkungan Masyarakat.

Disisi lain, para politisi yang Tengah mencari suara seringkali menghampiri kiai untuk meminta wejangan terhadapnya untuk menjalankan pemerintahan atau bahkan ada politisi yang meminta dukungan kepada kiai karena dirasa seorang sosok kiai memiliki massa yang banyak dan berpotensi dan mendulangkan suara yang banyak terhadapnya. Pada fase ini, peran kiai yang memiliki pengaruh yang kuat dimanfaatkan oleh para politisi untuk mencari suara. Berbagai cara yang dilakukan oleh para politisi dalam melaksanakan kampanye untuk mendapatkan suara tidak melupakan arti penting peran kiai dalam perolehan suara. Dapat dilihat setelah reformasi, banyak sekali partai politik yang mengusung azas partainya menggunakan unsur keislaman dalam landasan ideologis partainya.

Seiring dengan berjalannya waktu, sosok seorang kiai yang pada mulanya menjadi tokoh agama, kini tengah merambat pada tokoh politik. Tidak sedikit kiai yang terjun langsung kedalam dunia politik, seperti contoh mantan wakil presiden ke 7 Indonesia. Ia merupakan tokoh agama atau bisa disebut kiai yang kemudian terjun kedalam politik dan menjadi wakil presiden.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, mengenai transformasi peran kiai dari otoritas keagamaan ke ranah politik praktis, maka muncul suatu permasalahan yang mana oleh kita dirumuskan dengan berbagai pertanyaan. Pertama, bagaimana perubahan peran kiai dalam politik: dari otoritas keagamaan ke politisi praktis?, Kedua, bagaimana peran kiai dalam menjaga netralitas agama ditengah politisi praktis? dan pertanyaan Ketiga bagaimana dampak keterlibatan kiai dalam politik terhadap stabilitas sosial dan pluralisme di indonesia?. Permasalahan yang ada pada pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transformasi sosok kiai yang mulanya sebagai tokoh agama dan kini Tengah berubah menjadi tokoh politik dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana factor yang terjadi atas transformasi ini. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peran kiai berubah dan dampak apa yang dihasilkan atas transformasi tersebut terhadap lingkungan politik dan masyarakat.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

Dalam penelitian ini ada beberapa literatur terdahulu yang sudah membahas topik mengenai Peran Kiai dalam Politik Indonesia yang mana literatur terdahulu tersebut menjadi bahan acuan dan juga referensi dalam penulisan jurnal ini. Adapun literatur terdahulu yang pertama ada jurnal dari Tomi Nurrohman , dalam jurnalnya yang berjudul “*Dilema Partisipasi Kiai Dalam Panggung Politik*” menguraikan dilema yang dihadapi kiai saat terlibat dalam politik. Partisipasi mereka sering dihadapkan pada dua kutub, yaitu mempertahankan otoritas moral di kalangan umat atau terjebak dalam pragmatisme politik. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik kiai dapat memperkuat legitimasi mereka sebagai tokoh agama, tetapi di sisi lain berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat ketika mereka dianggap lebih berpihak pada kepentingan politik daripada kepentingan umat. Penelitian ini relevan untuk memahami dualitas peran kiai sebagai pemimpin moral dan aktor politik. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah pengungkapan bahwa kiai sering berada dalam posisi ambigu, di mana keputusan politik mereka dapat berdampak positif atau negatif pada integritas sosial mereka. Artikel ini melengkapi diskursus dengan memberikan perspektif dilematis yang dialami kiai, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian lain.

Kemudian literatur terdahulu yang kedua jurnal dari Hasanatul Jannah yang berjudul “*Kyai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan*” mengeksplorasi bagaimana kiai berperan dalam proses perubahan sosial dan dinamika politik kekuasaan. Artikel ini mengemukakan bahwa peran kiai tidak terbatas pada ranah politik praktis, tetapi juga dalam mendorong transformasi sosial di masyarakat. Jannah menekankan bahwa kiai sering menjadi penggerak utama dalam merespons tantangan-tantangan sosial, seperti isu kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan.

Artikel ini memberikan kontribusi penting dengan memperluas pemahaman tentang bagaimana kiai dapat menjadi agen perubahan sosial yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada politik elektoral. Namun, artikel ini kurang mengulas tantangan yang dihadapi kiai dalam menghadapi tekanan dari aktor politik lain. Penelitian ini melengkapi literatur dengan menambahkan dimensi perubahan sosial dalam diskursus peran kiai.

Selanjutnya literatur terdahulu yang ketiga dari Abdurrahman Wahid yang berjudul “*Peran Tokoh Agama dalam Mencegah Politisasi Agama dalam Demokrasi Indonesia*” membahas peran tokoh agama, termasuk kiai, dalam mencegah politisasi agama dalam demokrasi Indonesia. Artikel ini menyoroti bahaya politisasi agama yang dapat

mengancam harmoni sosial dan stabilitas politik, terutama ketika agama digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik praktis. Wahid menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga netralitas dan membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai demokrasi secara inklusif. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah perspektif normatif yang menekankan tanggung jawab moral tokoh agama dalam menjaga integritas demokrasi. Artikel ini melengkapi literatur dengan memberikan dimensi etis dan preventif, yang jarang menjadi fokus utama dalam kajian lain.

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa peran kiai dalam politik sangat kompleks dan multidimensional. Tomi Nurrohman memberikan gambaran tentang dilema yang dihadapi kiai, sementara Hasanatul Jannah menyoroiti peran kiai dalam perubahan sosial, dan Abdurrahman Wahid menambahkan dimensi etis dalam mencegah politisasi agama. Artikel ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan menyatukan berbagai perspektif tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang partisipasi kiai dalam politik dan dampaknya pada masyarakat. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ini, penelitian diharapkan dapat menawarkan kontribusi baru dalam diskursus peran kiai di panggung politik Indonesia.

### **3. METODOLOGI**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, ataupun skripsi tentunya akan menggunakan metode dalam penulisannya. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah Langkah ilmiah untuk memperoleh data dengan manfaat dan tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut itu tergantung dengan arah penulis yang ingin menggunakan metode yang mana. Dalam metode penulisan karya tulis ilmiah ada dua macam metode yang sering digunakan oleh para penulis, yang pertama metode kuantitatif dan yang kedua metode kualitatif. (Syafri, et al 2021)

Mengutip dari buku "Ilmu Budaya Dasar Dalam Perspektif Baru" yang ditulis Beni Ahmad Saebani bahwasannya secara politis, manusia berusaha mengangkat pemimpin yang menjadi tokoh utama pemilik kekuasaan yang berwenang mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, memerintah dan memimpin demi kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, sejalan dengan sosok kyai yang dipercayai oleh masyarakat sebagai pemimpin umat.

Penelitian kuantitatif melibatkan data numerik atau non-numerik (data kuantitatif/kualitatif) dan menganalisis serta menafsirkannya menggunakan rumus statistik tertentu untuk memverifikasi hipotesis yang memiliki tujuan umum yang telah disiapkan

sebelumnya. Sebab akibat suatu hal (hubungan sebab akibat). Sedangkan penelitian kualitatif atau naturalistik, yaitu niat untuk menemukan kebenaran di balik data yang dikumpulkan. (Mundir, et al 2013).

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif dengan cara studi kepustakaan dan dokumen yang menitikberatkan kepada asas-asas hukum yang berlaku.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Perubahan Peran Kiai Dalam Politik: Dari Otoritas Keagamaan ke Politisi Praktis**

Masyarakat Jawa sering menggunakan istilah "kyai" untuk merujuk kepada orang yang dianggap "alim" dalam tradisi Islam. Kyai biasanya memiliki kharisma, memimpin pesantren, mengajarkan kitab-kitab klasik (juga dikenal sebagai kitab kuning), atau terhubung dengan kelompok Islam tradisional. Secara khusus, istilah ini hanya digunakan dalam budaya Jawa di Indonesia. Dalam tradisi intelektual masyarakat Jawa, istilah "kyai" sering diartikan sebagai ulama. Namun, arti ulama sebenarnya lebih luas, dan kyai lebih sering dipahami sebagai seseorang yang mendalami dan berkomitmen pada ilmu keislaman, serta memiliki sifat kharismatik yang tercermin dalam praktik hidupnya.

Dari sudut pandang umat Islam tradisional Jawa, kyai dianggap sebagai bagian dari kelompok elite agama. Elite agama dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kualitas tertentu yang memungkinkan mereka berperan dalam kekuasaan sosial dan politik. Kyai disebut sebagai elite agama karena mereka memiliki kualitas yang membedakan mereka dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kyai sebagai elit agama, memiliki peran khusus di masyarakat. Melalui doa yang dianggap membawa berkah, kyai dipandang oleh jamaah sebagai orang berilmu, pewaris Nabi, model hidup, tempat meminta nasihat, dan penolong. Kyai bahkan dianggap dapat memberikan solusi dari berbagai persoalan hidup. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kehidupan kyai biasanya berfokus pada tasawuf, dengan penekanan pada memperoleh pemahaman keagamaan dan spiritualitas yang mendalam untuk mencapai kebijaksanaan yang tinggi. (Suaidi, et al 2021).

Otoritas (authority), menurut KBBI, didefinisikan sebagai hak untuk bertindak, kewenangan, atau kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki hak untuk memberikan perintah dan menuntut kepatuhan biasanya didefinisikan sebagai wewenang. Kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti arahan tertentu dikenal sebagai otoritas dalam sosiologi. Beberapa istilah yang saling berhubungan dalam teori politik adalah kekuasaan (power),

legitimasi (legitimacy), dan wewenang. Kemampuan untuk mengontrol sumber daya sendiri dan orang lain tanpa mengganggu masyarakat disebut kekuasaan. Mereka yang berkuasa memiliki wewenang untuk bertindak sesuai dengan kemampuannya.

Dalam konteks keagamaan, otoritas dapat didefinisikan sebagai kewenangan, kekuasaan, atau hak untuk bertindak dalam bidang keagamaan sehingga orang lain mematuhi atau mengikuti perintah. Otoritas agama tidaklah berdiri sendiri, karena sejarah agama selalu berkaitan erat dengan politik, otoritas agama sering kali terhubung dengan otoritas politik. Namun, otoritas agama bukanlah sesuatu yang bersifat tetap. Dalam perjalanannya, ia bersifat sangat dinamis. Beragam tingkat otoritas agama dan interaksi di antara tingkat-tingkat tersebut menjadi bagian dari dinamika yang terus berkembang. (Rokhmad, et al 2021)

Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin Muslim terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian mendukung penyatuan Islam dengan politik, sedangkan yang lain memilih untuk memisahkan keduanya. Kelompok Islam politik tidak berhasil mendapatkan tempat di kekuasaan selama Orde Lama, terutama setelah pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno pada awal 1960-an. Situasi serupa berlanjut selama Orde Baru. Pemimpin otoriter Presiden Soeharto mencegah kelompok Islam politik berkembang. Beberapa kelompok politik Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibentuk, sementara kelompok Islam radikal seperti Komando Jihad dihapus. Militer juga digunakan untuk memerangi gerakan separatis Muslim, seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Saat itu, Presiden Soeharto hanya memberikan peluang untuk kemajuan Islam di bidang budaya. Oleh karena itu, para aktivis Islam politik, termasuk tokoh-tokoh penting dari masa lalu Partai Masyumi, memilih untuk tetap diam dan menghindari. Mereka tidak berani tampil secara terbuka saat mengadakan kegiatan seperti pengajian dan pertemuan keagamaan. Ini karena mereka tahu bahwa Soeharto tidak menyukai kelompok Muslim yang memanfaatkan Islam sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Dianggap dapat mengancam stabilitas nasional, kelangsungan Orde Baru, posisi Soeharto dan lingkaran kekuasaannya di Cendana.

Sebagian besar cendekiawan Islam moderat dan teknokrat Muslim modernis baru mulai mendekati Presiden Soeharto pada awal 1990-an. Namun, sebagian dari mereka justru berbalik menjadi "Brutus", yang membuatnya lebih lemah saat krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, yang pada akhirnya mengakhiri Soeharto dan rezim Orde Baru. Orang-orang yang sebelumnya bersembunyi sekarang mulai muncul dan mengadakan kegiatan dan acara yang berkaitan dengan Islam politik secara terbuka.

Kejatuhan Soeharto membuka jalan menuju demokrasi yang memungkinkan orang-orang, termasuk kelompok Islam, untuk berbicara dan beraktivitas dengan bebas. Ironisnya, sejumlah kelompok Islamis dan kelompok Islam radikal yang tidak toleran sering berusaha menghambat kebebasan dengan menindas berbagai aliran keagamaan atau kelompok yang mereka anggap menyimpang dari "ajaran resmi" Islam.

Mereka melakukan ini dengan mengatasnamakan agama. Meskipun mereka ingin kebebasan dan kemerdekaan untuk diri mereka sendiri, mereka enggan memberikan kebebasan kepada orang lain atau kelompok. Bahkan lebih ironis, mereka menggambarkan demokrasi sebagai "budaya kafir", Pancasila sebagai "sistem thoghut", dan Indonesia sebagai negara yang tidak menganut agama Islam. Padahal, sistem demokrasi memungkinkan mereka untuk berbicara bebas. Kebebasan sangat langka dalam rezim politik otoriter seperti Orde Baru.

Karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk berekspresi melalui demokrasi, kelompok Islam politik ini semakin tidak terkendali dan berkembang pesat. Karena itu, banyak hal mulai berlebihan, di mana segala sesuatu dinilai dari perspektif Islam dan harus sesuai dengan standar Islam. Meskipun demikian, apa yang mereka sebut sebagai ajaran Islam sebenarnya adalah debat keislaman yang dikembangkan oleh sejumlah ulama, aktivis, dan pemikir Muslim pilihan mereka. Sebagai contoh, gagasan "Negara Islam" yang mereka angkat dan sebut sebagai "ajaran Islam" sebenarnya merupakan produk politik kontemporer pascakolonial yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh seperti Abul A'la Maududi dan Sayyid Qutb, dan tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam itu sendiri. (Al Qurtuby, et al 2018).

### **Peran Kiai Dalam Menjaga Netralitas Agama Ditengah Politisi Praktis**

Keterlibatan kiai dalam politik pragmatis bukanlah perkembangan baru. Kiprah kiai dalam politik telah lama menancapkan perannya. Secara normatif, syariat Islam memberikan landasan hukum yang kokoh bagi kiai untuk turut serta dalam politik. Rasulullah adalah contoh empiris tentang keterlibatan kiai sebagai tokoh politik. Motivasi kiai untuk terjun ke dunia politik bersumber dari landasan moral dan empiris ini. Meskipun jumlah dan mutunya berubah-ubah pada setiap periode, kiai telah aktif dalam berbagai masalah politik sepanjang sejarah Indonesia, baik sebelum kemerdekaan, sepanjang masa orde lama, selama masa orde baru, maupun selama masa reformasi saat ini. Kiai memegang peranan penting dalam proses pewarnaan politik Indonesia.

Dalam menghadapi politisasi praktis yang berkembang di Indonesia, Kiai memainkan peran penting dalam menjaga kenetralan agama. Sebagai pemimpin moral dan pemimpin agama, Kiai diharapkan mampu membedakan antara prinsip-prinsip agama dan tujuan politik praktis, yang sering kali mengorbankan prinsip-prinsip inti agama atas nama kekuasaan. Upaya Kiai untuk menekankan bahwa agama adalah aturan universal untuk kehidupan yang adil dan damai daripada sarana untuk mendapatkan dukungan politik menunjukkan ketidakberpihakan agama mereka. Dengan menolak menggunakan mimbar untuk kampanye politik, mempertahankan prinsip independensi dalam semua keputusan politik, dan menawarkan pendidikan politik yang didasarkan pada cita-cita agama seperti akuntabilitas, keadilan, dan kejujuran, Kiai dapat menjaga kenetralan agamanya. (Azra, et al 2019).

Kiai dapat berperan sebagai mediator dalam konflik yang melibatkan agama dan politik dengan mengedepankan dialog dan toleransi antar kelompok. Peran ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, sekaligus memastikan agar agama tidak kehilangan kredibilitasnya sebagai sumber moralitas. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kiai juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawab politiknya secara kritis tanpa dipengaruhi oleh kepentingan elit politik tertentu. Dengan demikian, kiai memegang peran strategis dalam menjaga nilai-nilai agama dari eksploitasi politik dan mendorong kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. (Wahid, et al 2021).

Keterlibatan kiai dalam politik praktis kerap kali menimbulkan pertikaian di tingkat partai dan elite serta konfrontasi vertikal. Karena topik panggung adalah pertikaian yang tak kunjung usai, masyarakat kerap kali kecewa dengan perbedaan pendapat para politisi dan perbedaan kepentingan mereka dalam memaknai jalan politik. Di tengah politik praktis yang penuh konflik, peran kiai seharusnya diarahkan pada menjaga netralitas agama. Sebagai penjaga moralitas, kiai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa agama tidak dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu, yang berpotensi merusak persatuan umat. Kiai dapat menjadi penengah dalam konflik politik dengan menekankan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian. (Nurrohman, et al 2022)

Peran penting kiai dalam menyelesaikan masalah SARA dan radikalisme politik. Kiai dapat membantu masyarakat terhindar dari masalah-masalah yang dapat membahayakan stabilitas sosial dan politik dengan memberikan pemahaman yang benar tentang toleransi, pluralisme, dan perdamaian. Selain itu, para kiai dapat mendorong keterlibatan politik masyarakat dengan mendidik masyarakat tentang hak dan tanggung

jawab mereka sebagai warga negara. Mereka dapat membantu masyarakat menjadi peserta aktif dalam proses demokrasi, termasuk ikut serta dalam debat politik, pemilihan umum, dan acara politik lainnya, bukan hanya sekadar pemilih pasif. Para kiai dapat menggunakan media digital untuk menyebarkan pendidikan politik serta media tradisional seperti kajian dan ceramah agama untuk mengkomunikasikan pesan-pesan mereka. Para kiai dapat secara efektif dan luas menyebarkan pesan-pesan pendidikan politiknya dan menjangkau khalayak yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi. (Kurniati, et al 2024).

### **Dampak Keterlibatan Kiai Dalam Politik Terhadap Stabilitas Sosial Dan Pluralisme Di Indonesia**

Istilah kiai sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, kiai merupakan istilah yang merujuk kepada para alim ulama yaitu seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam hal ilmu agama. (Patoni, et al 2007). Sebagai tokoh agama yang dihormati atau bisa dibilang juga sebagai elite agama, kiai telah memainkan peran penting dalam politik umat Islam di Indonesia dari masa ke masa.

Secara tradisional, kiai dikenal sebagai pemimpin keagamaan. Namun, sejak era reformasi, peran ini mengalami perubahan. Istilah baru, yaitu "Kiai Politik," muncul untuk menggambarkan para kiai yang terjun ke dunia politik. Fenomena ini memicu diskusi yang cukup tajam. Ada pihak yang berpendapat bahwa kiai sebaiknya fokus pada urusan keagamaan saja. Namun, ada juga yang mendukung keterlibatan kiai dalam politik, dengan alasan bahwa kehadiran mereka dapat membantu menjaga etika politik dan mencegah terjadinya kekacauan di Indonesia.

Pada mulanya kiai hanya sebagai pemegang otoritas agama saja seperti halnya hanya dalam ruang lingkup pesantren saja, tetapi hingga saat ini kiai mampu menjadi multifungsi selain menjawab mengenai permasalahan ubudiyah kiai saat ini juga kehadirannya diminta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa masyarakat. Sehingga kharisma yang dimiliki oleh seorang kiai ini dapat memikat hati hati masyarakat dengan itu kiai memiliki basis massa yang banyak dan relasi yang kuat. (Sukanto, et al 1999).

Dari nilai kharismatik inilah kiai mampu untuk mempengaruhi tatanan masyarakat yang berbasis pada moral dan agama, dan tidak hanya dalam hal tatanan moral dan agama saja, akan tetapi dari kemampuan itu dapat digunakan dalam bidang politik. Sebagai elite agama, kiai memiliki daya tarik terhadap semua bidang khususnya kepada para pejabat hingga para tokoh partai politik.

Terdapat beberapa dampak mengenai keterlibatan kiai dalam politik terhadap stabilitas sosial dan pluralisme di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1) Kiai Sebagai Agen Transformasi Sosial Dalam Ranah Politik

Di era reformasi kiai kini tidak hanya menjadi elite agama saja yang hanya menjawab persoalan-persoalan urusan ubudiyah tetapi kiai kini mampu untuk terjun langsung menjawab persoalan masyarakat, hal ini menunjukkan multifungsi peran seorang kiai yang mana di zaman sekarang kiai pun terjun langsung kedalam ranah politik, baik sebagai penasihat maupun sebagai aktor politik.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para kiai yang terjun ke ranah politik seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beliau menjadi presiden ke-4 RI, yang mana KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini berasal dari latar belakang keulamaan Nahdlatul Ulama (NU), kemudian KH. Ma'ruf Amin, beliau menjabat sebagai wakil presiden RI. Sebelumnya beliau adalah ketua majelis Ulama Indonesia (MUI) serta dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan pemerintah. Serta masih banyak lagi kiai-kiai yang lain yang terjun ke ranah politik, hal ini menunjukkan adanya transformasi sosial dari sosok kiai yang notabennya dalam ranah agama tetapi bisa mampu terjun langsung ke ranah politik.

2) Kiai Sebagai *Reference Person*

Kiai dianggap sebagai tokoh yang dihormati di masyarakat, dan juga berfungsi sebagai *refence person* yaitu seseorang yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan sosial, budaya, serta politik. Peran ini tidak hanya mencerminkan pengaruh mereka dalam membimbing masyarakat secara spiritual, tetapi juga menunjukkan kemampuan mereka dalam membentuk opini publik dan menciptakan transformasi sosial. Di dalam ranah politik kiai sering menjadi penghubung antara nilai-nilai agama dan praktik politik. Mereka dianggap mampu memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan ataupun Tindakan politik tertentu. (Azis, et al 2019).

Sebagai *reference person*, kiai juga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan pluralisme. Dengan posisinya sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan, kiai dapat mendorong dialog lintas agama, meredakan konflik, dan membangun kohesi sosial. Namun, keterlibatan mereka dalam politik terkadang dinilai mengancam pluralisme, terutama jika dianggap memperkuat identitas agama tertentu dalam politik praktis.

### 3) Kiai Sebagai Mediator Konflik Politik

Karena sosok kiai dianggap memiliki basis massa yang banyak baik dari ruang lingkup pesantren maupun masyarakat, kadang seringkali dimanfaatkan oleh politisi untuk membangun basis dukungan. Mereka menggunakan pendekatan keagamaan untuk memperkuat legitimasi politik kandidat tertentu. Yang mana seharusnya kiai yang ideal itu harus bisa sebagai mediator seharusnya mampu menjaga netralitas, meredakan konflik serta menyampaikan pesan politik yang damai melalui dakwah dan pendekatan agama.(FAridl, et al 2005).

### 4) Peran Ganda Kiai

Keterlibatan kiai dalam politik Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial. Kiai yang selama ini dianggap sebagai elite agama saja kini turut terlibat dalam ranah politik, baik dalam dukungan terhadap pemerintah ataupun oposisi. Dengan peran ganda ini pastinya membawa banyak tantangan bagi kiai dalam hal mengelola waktu, tenaga, hingga pemikiran. Disamping hal ini memberikan dampak positif tetapi disisi lain hal ini justru menyebabkan terkikisnya charisma kiai di mata masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menganggap kiai sebagai sosok figur yang harus tetap menjaga jarak dengan politik praktis.

Dari narasi diatas sehingga munculah anggapan istilah "Kiai Politik". Tetapi dalam hal ini meskipun kiai terjun langsung ke ranah politik, mereka tetap diharapkan untuk selalu menjaga nilai-nilai moral serta tradisi agama yang sebelumnya telah lama melekat pada masyarakat. Hal ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara kiai sebagai pemimpin agama dan politisi, yang berujung pada penurunan pengaruh mereka jika tidak mampu menjaga keseimbangan antara kedua peran tersebut.(Jannah, et al 2005).

## 5. KESIMPULAN

Masyarakat Jawa sering menggunakan istilah "kyai" untuk merujuk kepada orang yang dianggap "alim" dalam tradisi Islam. Kyai biasanya memiliki kharisma, memimpin pesantren, mengajarkan kitab-kitab klasik (juga dikenal sebagai kitab kuning), atau terhubung dengan kelompok Islam tradisional. Dari sudut pandang umat Islam tradisional Jawa, kyai dianggap sebagai bagian dari kelompok elite agama. Elite agama dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kualitas tertentu yang memungkinkan mereka berperan dalam kekuasaan sosial dan politik. Karena mereka memiliki banyak kesempatan untuk berekspresi melalui demokrasi, kelompok Islam politik ini semakin tidak terkendali

dan berkembang pesat. Karena itu, banyak hal mulai berlebihan, di mana segala sesuatu dinilai dari perspektif Islam dan harus sesuai dengan standar Islam.

Kiai memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas agama di tengah dinamika politik pragmatis di Indonesia. Dengan berlandaskan syariat Islam, kiai berupaya mempertahankan agama sebagai sumber moralitas universal yang tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Dalam sejarah politik Indonesia, kiai telah menjadi penjaga nilai-nilai keadilan, toleransi, dan perdamaian, sekaligus mediator dalam konflik yang melibatkan agama dan politik. Meskipun keterlibatan mereka dalam politik sering memicu kontroversi, kiai terus berperan mendorong masyarakat memahami hak dan tanggung jawab politik secara kritis tanpa terpengaruh kepentingan elit. Melalui pendidikan politik, baik secara tradisional maupun dengan memanfaatkan media digital, kiai berkontribusi pada stabilitas sosial dan menjaga agar agama tidak kehilangan kredibilitasnya akibat eksploitasi politik.

Kiai, sebagai tokoh agama yang kharismatik, memiliki peran strategis yang meluas dari kepemimpinan keagamaan ke ranah politik. Dalam konteks politik praktis, kiai berfungsi sebagai agen transformasi sosial, reference person, mediator konflik, dan pelaku peran ganda. Sebagai elite agama, mereka mampu menjembatani nilai-nilai agama dan praktik politik, memberikan legitimasi moral, menjaga harmoni sosial, serta meredakan konflik politik. Namun, keterlibatan kiai dalam politik juga menimbulkan tantangan, termasuk risiko terkikisnya kharisma mereka akibat politisasi. Oleh karena itu, kiai yang terjun ke politik diharapkan tetap menjaga netralitas, nilai-nilai moral, dan tradisi agama demi mencegah konflik sosial dan memastikan stabilitas pluralisme di Indonesia.

## REFERENSI

- Abu Rokhmad, “ Mempersoalkan Otoritas Keagamaan”, SuaraMerdeka.com, 19 Agustus 2021.
- Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Azis,MA, dkk. (2019). PERAN KIAI DALAM POLITIK PADA MASYARAKAT DI DESA KUALA MANDOR A KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA. Publik a, Jurnal S1 Ilmu Politik, 7(4). <https://doi.org/10.26418/2548>.
- Azra, A. (2019). Islam, Politik, dan Demokrasi di Asia Tenggara: Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Komparatif. Jakarta: Mizan.
- Cecep Suryana Dkk, *Politik Kiai; Pandangan politik KH Sofyan Yahya*, ( Bandung; Gunung Djati Publishing; 2024).
- Faridl, M. (2005, June 13). Perilaku Sosial Politik Kiai di Tengah Masyarakat Transisi Kasus di Wilayah Cirebon Dan Bandung. Faridl | MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/171/pdf>
- Jannah, H. (2015). KYAI, PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN. FIKRAH, 3(1), 157–176. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1831>.
- Kurniati, P. (2024). *BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL*. Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA.
- M. Zaki Suaidi, Kyai, Pesantren dan Moderniasi, Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Nurrohman, T. (2022). Dilema Partisipasi Kiai Dalam Panggung Politik. *Metro Universitas*.
- Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*;(Jakarta:LP3ES,1999)
- Sumanto Al Qurtuby, Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia, Jurnal MAARIF, Vol.13, No. 2, Desember 2018.
- Wahid, A. (2021). “Peran Tokoh Agama dalam Mencegah Politisasi Agama dalam Demokrasi Indonesia.” Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 7(2).